

## FORMAT LAPORAN UNTUK LKPJ TA. 2023

### 1. Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN TUJUAN/SASARAN/PROG/KEG/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengawasan	1. Inspektorat Kota Pontianak		Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase	80,74	77,74	<p>1. Penetapan target atas kegiatan utama belum sepenuhnya didasarkan pada baseline tahun sebelumnya dan target RB nasional.</p> <p>2. Indikator output atas rencana aksi belum sepenuhnya relevan dan cukup menggambarkan sasaran yang ingin di wujudkan.</p> <p>3. Rencana aksi yang disusun belum berupa intervensi terhadap prioritas permasalahan utama.</p> <p>4. Rencana aksi RB Instansi Pemerintah belum ditetapkan secara formal.</p>	<p>1. Menetapkan target atas kegiatan utama berdasarkan pada baseline tahun sebelumnya dan target RB nasional.</p> <p>2. Memastikan indikator output atas rencana aksi relevan dan cukup menggambarkan sasaran yang ingin di wujudkan.</p> <p>3. Memastikan rencana aksi yang disusun merupakan intervensi terhadap prioritas permasalahan utama.</p> <p>4. Menetapkan keabsahan atas rencana aksi RB Instansi Pemerintah.</p>	
2				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100			
3				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	100			
4				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16	16			
5				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dokumen	1	1			
6				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Dokumen	1	1			
7				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN TUJUAN/SASARAN/PROG/KEG/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
8				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2			
9				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100	100			
10				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	46	46			
111				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	5	5			
12				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100	100			
13				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	2			
14				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100	100			
15				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	1	1			
16				Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Paket	4	4			
17				Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Paket	2	2			
18				Penyediaan bahan logistik kantor	Paket	1	1			
19				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	2	2			
20				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		0	0			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN TUJUAN/SASARAN/PROG/KEG/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
21				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	10			
22				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	100			
23				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	6	6			
24				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100			
25				Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0	0			
26				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	3	3			
27				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	9	9			
28				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	100			
29				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2	2			
30				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	58	58			
31				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0	0			
32				Sasaran 1 : Meningkatnya Pengendalian Internal						

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN TUJUAN/SASARAN/PROG/KEG/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
				Score maturitas SPIP	Score	3,5	3,3	<p>1. Sasaran dan indikator tidak berorientasi hasil.</p> <p>2. Target tidak memperhatikan capaian tahun lalu.</p> <p>3. Risiko strategis belum dikelola</p> <p>4. RTP tidak dimonitor.</p> <p>5. Risiko kecurangan belum dikelola.</p>	<p>1. Memperbaiki kualitas perencanaan daerah dengan memperhatikan cascading kinerja Pemerintah dengan indikator kinerja yang memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup.</p> <p>2. Mengimplementasikan pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah.</p> <p>3. Menjadikan proses manajemen risiko melekat pada proses bisnis Pemerintah Daerah.</p> <p>4. Mendorong setiap UPR di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak agar menyusun laporan pelaksanaan penilaian risiko dan laporan berkala pengelolaan risiko pada Pemerintah Kota Pontianak.</p> <p>5. Mendorong UPR di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk mengelola risiko fraud.</p>	
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Persentase	83	74,84	<p>Usia temuan yang sudah lama dan terjadinya mutasi/ meninggalnya Pegawai yang harus menindaklanjuti TLHP BPK</p>	<p>1. Mengintensifkan penyelesaian tindak lanjut kepada Perangkat Daerah</p> <p>2. Melakukan kajian untuk mengupayakan alih status temuan</p> <p>3. Memaksimalkan tugas TPTGR dan Majelis Kerugian Daerah</p> <p>4. Memfasilitasi penyelesaian tindak lanjut melalui pihak terkait</p>	
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	Persentase	100	34,48	<p>Usia temuan yang sudah lama dan terjadinya mutasi/ meninggalnya Pegawai yang harus menindaklanjuti TLHP APIP</p>	<p>1. Mengintensifkan penyelesaian tindak lanjut kepada Perangkat Daerah</p> <p>2. Memaksimalkan tugas TPTGR dan Majelis Kerugian Daerah</p> <p>3. Memfasilitasi penyelesaian tindak lanjut melalui pihak terkait</p>	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN TUJUAN/SASARAN/PROG/KEG/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
33				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase	100	100			
				Score maturitas SPIP	Score	3,5	3,3			
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	Persentase	83	74,84			
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	Persentase	100	34,48			
34				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase	100	100			
35				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	37	37			
36				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	44	44			
37				Reviu Laporan kinerja	Laporan	129	129			
38				Reviu Laporan keuangan	Laporan	1	1			
39				Kerjasama pengawasan internal		0	0			
40				Monitoring dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Dokumen	8	8			
41				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase	100	100			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN TUJUAN/SASARAN/PROG/KEG/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
42				Penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah	Laporan	2	2			
43				Pengawasan dengan tujuan tertentu	Laporan	6	6			
44				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase	100	100			
45				Sasaran 2 : Meningkatnya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM						
				Persentase unit kerja yang memenuhi standar diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM	Persentase	20	-	Tidak adanya unit kerja yang memenuhi standar untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM	Melakukan pendampingan dan asistensi terhadap unit kerja agar dapat memperoleh predikat WBK/WBBM	
				Level Kapabilitas APIP	Level	3	3			
46				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi	Persentase	100	100			
				Persentase unit kerja yang memenuhi standar diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM	Persentase	20	-			
				Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti diklat/bimtek 120 jam/Tahun per orang	Persentase	100	41,25	Kurangnya anggaran untuk mengikuti diklat/bimtek 120 jam/tahun per orang	Menyampaikan surat/Telahaan staf ke Bapak Wali Kota mengenai pemenuhan Mandatory Spending	
47				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase	100	100			
48				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rekomendasi	2	2			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN TUJUAN/SASARAN/PROG/KEG/SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUTAN REKOMENDASI DPRD
49				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Rekomendasi	4	4			
50				Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase	100	100			
51				Pendampingan dan asistensi urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	30	30			
52				Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Perangkat Daerah	30	3			
53				Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kegiatan	8	8			
54				Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Perangkat Daerah	2	2			

Keterangan:

- Diambil dari laporan TW 4 yang sudah diasistensi dengan menambahkan kolom Kebijakan, Permasalahan, Upaya Mengatasi Permasalahan dan Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD.
- Laporan paling lambat disampaikan 1 pekan setelah asistensi.

## 2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Meningkatkan pengendalian internal dengan mengimplementasikan SPIP pada level terdefinisi	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2010 SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak	SPIP Pemerintah Kota Pontianak pada level 3 terdefinisi
2.	Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP	Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dan PMK Nomor 116 Tahun 2007 tentang penyusunan rencana tindak lanjut Pemerintah terhadap temuan pemeriksaan keuangan oleh BPK atas LKKL, LKBUN dan LKPP.	Berdasarkan rekapitulasi tahunan matrik pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK: jumlah rekomendasi TLHP BPK sebanyak 1.014. TLHP yang sesuai dengan rekomendasi sebanyak 774, belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 237. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1. Rekomendasi yang tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 2.
3.	Meningkatkan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Instansi Pemerintah.	Melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap unit kerja agar dapat di usulkan memperoleh predikat WBK/WBBM.
4.	Meningkatkan level Kapabilitas APIP	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2010 SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan Peraturan BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang pedoman peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Pemerintah Kota Pontianak berada pada level 3

Keterangan:

- Laporan paling lambat disampaikan 1 pekan setelah asistensi.

## 3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

### Inspektorat tidak ada rekomendasi DPRD

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut:



No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.			

Keterangan:

- Sesuaikan dengan jawaban rekomendasi DPRD yang telah disampaikan, jika perlu dapat diperbaiki kembali.
- Laporan paling lambat disampaikan 1 pekan setelah asistensi.

Pontianak, 15 Februari 2024

Inspektur Kota Pontianak,

YAYA MAULIDIA, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680606 199503 2 003